

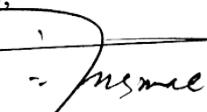
KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Lolak adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Lolak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Lolak. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Lolak, Juli 2021
Sekretaris,

Rechiat Enoch, S.Ag
NIP. 19760209 200805 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	31
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	39
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
F. Pengungkapan Penting Lainnya	46
VI. Lampiran dan Daftar	48

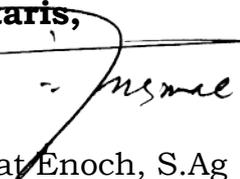
PENGADILAN AGAMA LOLAK

Jl. Trans Sulawesi, Lalow - Kecamatan Lolak Telp. (0434) 2608191
Website : www.pa-lolak.go.id E-mail : pa.lolak.sulut@gmail.com
Lolak - 95761

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Lolak yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lolak, Juli 2021
Secretaris,


Rachmat Enoch, S.Ag
NIP 19760209 200805 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Lolak Semester I Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 2.034.000,- atau mencapai 00.00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2021 adalah sebesar Rp. 14.135.002.620 atau mencapai 65% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 21.855.673.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2021.

Nilai Aset per 30 Juni 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp 17.999.420.098 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 20.045.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 17.979.375.098; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0;

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 20.000.000; dan Rp 17.979.420.098,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode

sampai dengan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 339.000; sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 1.725.487.467; sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp -1.725.148.467; Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 1.695.000; dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp -1.723.453.467,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp 5.569.904.945; dikurangi Defisit-LO sebesar Rp -1.723.453.467, kemudian ditambah dengan Penyesuaian Nilai Aset Rp. 0, koreksi nilai aset tetap non revaluasi Rp 0, dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 14.132.968.620, ditambah kenaikan entita sebesar Rp. 12.409.515.153, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2021 adalah senilai Rp 17.979.420.098,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I TA 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA LOLAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI TA 2021		% thd Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	2.034.000	0	1.017.000
JUMLAH PENDAPATAN		0	2.034.000	0	1.017.000
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	1.986.880.000	1.171.759.734	58,97%	1.084.663.395
Belanja Barang	B.3	895.720.000	457.752.791	51,10%	343.120.031
Belanja Modal	B.4	18.973.073.000	12.505.490.095	65,91%	835.325.774
JUMLAH BELANJA		21.855.673.000	14.135.002.620	64,67%	2.263.109.200

II. NERACA

**PENGADILAN AGAMA LOLAK
 NERACA
 PER 30 JUNI
 2021 DAN 2020**

(DalamRupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	20.000.000	-
Persediaan	C.2	45.000	40.000
JUMLAH ASET LANCAR		20.045.000	40.000
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.3	994.070.690	969.070.690
Konstruksi dalam pengerjaan	C.4	17.463.883.683	4.983.393.588
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.5	(478.579.275)	(378.699.426)
JUMLAH ASET TETAP		17.979.375.098	5.573.764.852
JUMLAH ASET		17.999.420.098	5.573.804.852
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga		-	3.899.907
Uang Muka dari KPPN	C.6	20.000.000	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		20.000.000	3.899.907
JUMLAH KEWAJIBAN		20.000.000	3.899.907
EKUITAS			
Ekuitas			
Ekuitas	C.7	17.979.420.098	5.569.904.945
JUMLAH EKUITAS		17.979.420.098	5.569.904.945
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		17.999.420.098	5.573.804.852

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA LOLAK LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	339.000	1.017.000
JUMLAH PENDAPATAN		339.000	1.017.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1.167.859.827	1.071.459.395
Beban Persediaan	D.3	28.981.260	16.312.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	261.770.101	227.102.100
Beban Pemeliharaan	D.5	106.545.430	43.478.779
Beban Perjalanan Dinas	D.6	60.451.000	36.493.752
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	99.879.849	96.754.849
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		1.725.487.467	1.491.600.875
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.725.148.467)	(1.490.583.875)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.11	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.695.000	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.695.000	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1.695.000	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(1.723.453.467)	(1.490.583.875)
POS LUAR BIASA			
	D.12	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(1.723.453.467)	(1.490.583.875)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PENGADILAN AGAMA LOLAK
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	E.1	5.569.904.945	695.851.861
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1.723.453.467)	1.490.583.875
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN		-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.3	-	-
Penyesuaian Nilai Kewajiban	E.4	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.5	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.6	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.7	-	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.8	-	-
Koreksi Lain - Lain	E.9	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		14.132.968.620	2.262.092.200
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		12.409.515.153	771.508.325
EKUITAS AKHIR	E.8	17.979.420.098	1.467.360.186

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Lolak

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Tahun 2021 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2020 – 2024 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Agama Lolak pada tahun 2021 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Lolak.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Lolak sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Agama Lolak adalah :

“Mewujudkan Pengadilan Agama Lolak Yang Agung”

Misi Pengadilan Pengadilan Agama Lolak adalah :

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Lolak
2. Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Lolak Yang Moderen.
3. Meningkatkan Kualitas Dan Transparansi Sistem Administrasi Pengadilan Agama Lolak.
4. Meningkatkan Kajian Syari'ah Sebagai Sumber Hukum Materil Pengadilan Agama Lolak.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Agama Lolak melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Lolak setiap tahun merencanakan, menyusun dan membuat Program Kerja. Program Kerja pada dasarnya meliputi uraian tugas pokok pada setiap bagian unit organisasi dan mekanisme pelaksanaannya berupa pelaporan serta pengawasannya.
2. Pengadilan Agama Lolak setiap tahun merencanakan, menyusun dan membuat pembagian tugas (job description) yaitu membagi tugas pokok organisasi ke seluruh Sub Bagian dan staf untuk mewujudkan pelaksanaan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas.
3. Ketua Pengadilan telah membuat suatu keputusan dengan menunjuk masing-masing menjadi Pengawas Bidang (Hawasbid) yaitu menindaklanjuti Keputusan Ketua MA RI No. KMA/080/SK/VII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

4. Penyelesaian perkara maksimal dalam waktu 6 bulan.
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Agama Lolak dengan mengikutsertakan pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, lembaga lainnya maupun di lingkungan Pengadilan Agama sendiri.
6. Turut serta melakukan pembaruan sistem Peradilan yang berwibawa, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana cetak biru (blue print) yang dibuat oleh Mahkamah Agung
7. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi di era globalisasi ini, Pengadilan Agama Lolak sudah mempunyai website (laman) dengan Home Page : www.pa-lolak.go.id, Selain sebagai bentuk tindak-lanjut pembaruan MARI, juga sebagai bentuk pelaksanaan amanat Keputusan Ketua MARI No. 144/KMA/SKIVIII/2007 tahun 2007 berupa Transparasi Peradilan, serta membantu kelancaran tugas sehingga Asas Peradilan Beracara Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dapat tercapai.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I TA 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Lolak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian

Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Lolak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Agama Lolak dalam penyusunan dan penyajian

Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Lolak. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Lolak adalah sebagai berikut:

Pendapatan-

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada

LRA

Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Agama Lolak adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran

Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di

neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%

Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset

dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Lolak telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan anggaran dari Mahkamah Agung untuk peningkatan jaringan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2021	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Perpajakan	0	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	1.986.880.000	1.986.880.000
Belanja Barang	895.720.000	895.720.000
Belanja Modal	18.973.073.000	18.973.073.000
Jumlah Belanja	21.855.673.000	21.855.673.000

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan Rp
2.034.000,-*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 2.034.000,- atau mencapai 00,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0,- Pendapatan Pengadilan Agama Lolak terdiri dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu dan Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	1.695.000	-
Penerimaan Kembali Persekot	-	339.000	-
Jumlah	-	2.034.000	-

- Penerimaan yang diperoleh berasal dari Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu dan penerimaan kembali persekot. Penerimaan ini berasal dari pemotongan pada gaji 1 (satu) orang pegawai dengan

jumlah Potongan sebesar Rp.2.034.000

- *Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	1.695.000	1.017.000	0,60
Penerimaan Kembali Persekot	339.000	-	0,00
Jumlah	2.034.000	1.017.000	0,50

B.2 Belanja

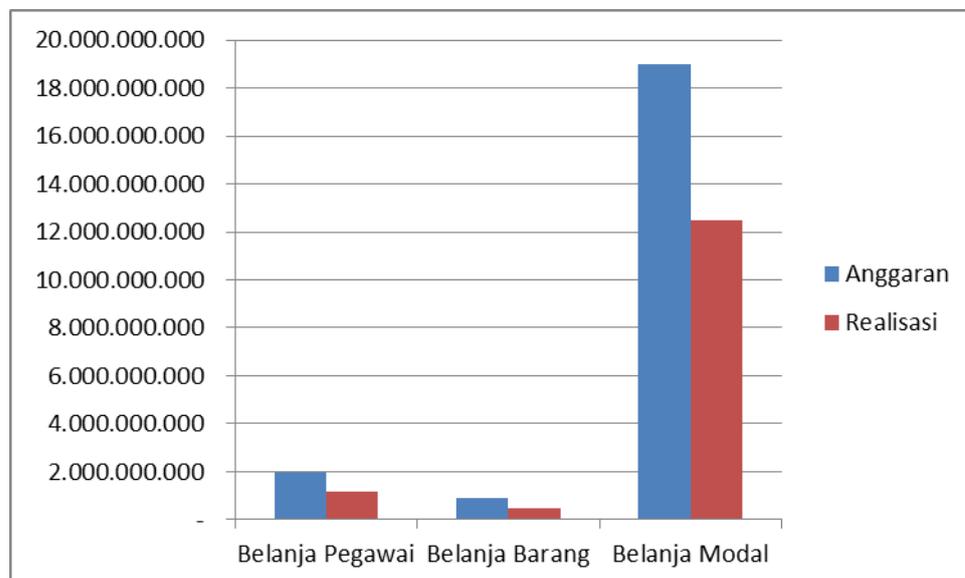
*Realisasi
 Belanja Negara
 Rp.
 14.135.002.620*

Realisasi Belanja instansi pada Semester I TA 2021 adalah sebesar Rp 14.135.002.620.- atau 65% dari anggaran belanja sebesar Rp 21.855.673.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester I TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	1.986.880.000	1.171.759.734	58,97%
Belanja Barang	895.720.000	457.752.791	51,10%
Belanja Modal	18.973.073.000	12.505.490.095	65,91%
Total Belanja Kotor	21.855.673.000	14.135.002.620	64,67%
Pengembalian	-	-	0,00%
Jumlah	21.855.673.000	14.135.002.620	64,67%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Berikut adalah perbandingan realisasi belanja untuk periode 30 Juni 2021 dan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1.171.759.734	1.084.663.395	8%
Belanja Barang	457.752.791	343.120.031	33%
Belanja Modal	12.505.490.095	835.325.774	1397%
Jumlah	14.135.002.620	2.263.109.200	525%

B.2 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai Per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah *Rp 1.171.759.734* masing-masing sebesar Rp 1.171.759.734,- dan Rp 1.084.663.395,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai Per 30 Juni 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.171.759.754	1.084.663.395	8,03
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	1.171.759.754	1.084.663.395	8,03
Pengembalian Belanja Pegawai	(20)	-	-
Jumlah Belanja	1.171.759.734	1.084.663.395	8,03

B.3 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp457.752.791,-

Realisasi Belanja Barang Per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 457.752.791,- dan Rp 343.120.031,-

Perbandingan Belanja Barang TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	209.842.000	208.492.200	0,65
Belanja Barang Non Operasional	70.600	0	-
Belanja Jasa	51.857.501	45.275.500	14,54
Belanja Pemeliharaan	96.991.430	39.790.779	143,75
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	60.451.000	36.493.752	65,65
Belanja Barang Persediaan	38.540.260	27.337.800	40,98
Jumlah Belanja Kotor	457.752.791	357.390.031	28,08
Pengembalian Belanja	-	(14.270.000)	(100,00)
Jumlah Belanja	459.068.824	343.120.031	33,79

B.4 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp
12.505.490.095

Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 12.505.490.000,- dan 835.325.774,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000	62.500.000	(60,00)
Belanja Modal Gedung dan bangunan	12.480.490.095	772.825.774	1.514,92
Jumlah Belanja Kotor	12.505.490.095	835.325.774	1.397,08
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	459.068.824	835.325.774	(45,04)

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp25,000,000

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 adalah sebesar Rp. 25,000,000.

Untuk TA 2021 belanja Modal peralatan dan mesin adalah :

- ❖ Pengadaan 4 unit Komputer PC sebesar Rp. 25.000.000,- sesuai SPM Nomor 00024 Tanggal 11-02-2021, SP2D Nomor 211581302000106 Tanggal 15-02-2021;

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Alat Pengolah Data	25.000.000	62.500.000	(60,00)
Jumlah Belanja Kotor	25.000.000	62.500.000	(60,00)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	25.000.000	62.500.000	(60,00)

B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 adalah sebesar Rp. 12.480.490.095.

Berikut tabel KDP sampai dengan per 30 Juni 2021 :

URAIAN	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	PERSEN TASI PEKERJAAN	NILAI KDP	KETERANGAN		
					DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN
Honorarium tenaga teknis bulan Januari tahun 2021	W18-A7/5/PL.01/1/2021	13.500.000			√		
Honorarium tenaga teknis bulan Februari tahun 2021	W18-A7/5/PL.01/1/2021	13.500.000			√		
Pekerjaan Konstruksi Pembangunan	W18-A7/05/PL.01/2/2021	5.084.187.148			√		
Pembangunan Gedung Kantor	W18-A7/253/KP.01.1/3/2021	14.3 1.384			√		
Pembangunan Gedung Kantor	W18-A7/302/KU.00/3/2021	10.918.000			√		
Honorarium tenaga teknis bulan Maret tahun 2021	W18-A7/5/PL.01/1/2021	13.500.000			√		
Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan	W18-A7/11/PL.01/4/2021	469.585.966			√		
Pekerjaan Konstruksi Pembangunan	W18-A7/11/PL.01/4/2021	6.778.916.197			√		
honorarium tenaga teknis bulan April tahun 2021	W18-A7/5/PL.01/1/2021	13.500.000			√		
Pembangunan Gedung Kantor	W18-A7/396/KP.01.1/5/2021	5.400.000			√		
embangunan Gedung Kantor	W18-A7/03/KU.01/1/2021	11.900.000			√		
honorarium tenaga teknis bulan Mei tahun 2021	W18-A7/5/PL.01/1/2021	13.500.000			√		
Pembangunan Gedung Kantor	W18-A7/406/KP.01.1/5/2021	4.040.000			√		
Pembangunan Gedung Kantor	W18-A7/19/KU.01/5/2021	7.550.000			√		
Pembangunan Gedung Kantor	W18-A7/17/KU.01/6/2021	5.900.000			√		

Pembangunan Gedung Kantor	W18-A7/473/KP.01.1/G/2021	6.721.400			J		
honorarium tenaga teknis bulan Mei tahun 2021	W18-A7/5/PL.01/1 2021	13.500.000			J		

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Gedung dan Bangunan	12.480.490.095	772.875.774	1.514,92
Jumlah Belanja Kotor	12.480.490.095	772.875.774	1.514,92
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	12.480.490.095	772.875.774	1.514,92

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp20.000.000*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 20.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	THN 2021	THN 2020
BRI Cabang Kotamobagu	-	-
Uang Tunai	20.000.000	-
Jumlah	20.000.000	-

Persediaan

C.2. Persediaan

Rp. 45.000

Nilai Persediaan per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp15.000 dan Rp 40.000,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	THN 2021	THN 2020
Barang Konsumsi	45.000	40.000
Jumlah	45.000	40.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah

C.3 Tanah

Rp 0

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Tondano per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. tidak ada Kenaikan nilai aset tetap Tanah. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	0
Mutasi Tambah :	
Pembelian	0
Mutasi Kurang :	
Penyitaan Pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2021	0

*Peralatan dan
Mesin
Rp994.070.690*

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah Rp 994.070.690,- dan Rp 969.070.690 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	969.070.690
Mutasi Tambah :	
Pembelian	25.000.000
Hibah Barang	
Koreksi Tambah	
Mutasi Kurang :	
Penghentian dari Penggunaan	
Saldo per 30 Juni 2021	994.070.690
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	478.579.275
Nilai Buku per 30 Juni 2021	515.491.415

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

1. Pembelian Komputer PC sebesar Rp.25.000.000.-

*Gedung dan
Bangunan
Rp 0*

C.5 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah Rp 0 dan Rp 0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	0
Mutasi Tambah :	
Mutasi Kurang :	
Saldo per 30 Juni 2021	
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	
Nilai Buku per 30 Juni 2021	0

Tidak ada mutasi tambah maupun kurang untuk aset ini.

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp0*

C.6 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	0
Mutasi Tambah :	
Mutasi Kurang :	
Saldo per 30 Juni 2021	
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	
Nilai Buku per 30 Juni 2021	0

Tidak ada Mutasi tambah maupun kurang pada periode pelaporan ini.

C.7 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah Rp 0 dan Rp 0. Aset tetap tersebut berupa barang Monografi atau buku yang disimpan di Perpustakaan Kantor.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	0
Mutasi Tambah :	
Mutasi Kurang :	
Saldo per 30 Juni 2021	
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	
Nilai Buku per 30 Juni 2021	0

Tidak ada Mutasi tambah maupun kurang pada periode pelaporan ini.

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp(478.579.275)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp(478.579.275) dan Rp(378.699.426). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	994.070.690	478.579.275	515.491.415
	Jumlah	994.070.690	478.579.275	515.491.415

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

C.10 Aset Tak Berwujud

*Aset Tak
Berwujud Rp 0,-*

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp 0 dan Rp 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	0
Mutasi Tambah :	
Mutasi Kurang :	
Saldo per 30 Juni 2021	
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	
Nilai Buku per 30 Juni 2021	0

Tidak ada Mutasi pada Aset Tak Berwujud.

C.11 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp 0

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah Rp 0 dan Rp 0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	0
Mutasi Tambah :	
Mutasi Kurang :	
Saldo per 30 Juni 2021	
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	
Nilai Buku per 30 Juni 2021	0

Tidak ada Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain pada periode pelaporan ini.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp 0 **C.12 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp 0 dan Rp 0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Uang Muka dari KPPN Rp20.000.000 **C.13 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp20.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.14 Ekuitas

Ekuitas Rp17.979.420.098 Ekuitas per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 17.979.420.098 dan Rp 5.569.904.945. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP
Rp339.000*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 339.000 dan Rp 0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 30 Juni 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Lainnya	339.000	0	(0,00)
Jumlah	339.000	0	(0,00)

Pendapatan Lain-Lain merupakan pengembalian kembali persekot / uang muka gaji yang berasal dari transaksi tahun 2020.

D.2 Beban Pegawai

*Beban Pegawai
Rp 1.167.859.827*

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 1.167.859.827 dan Rp. 1.071.459.395,-

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pegawai	1.167.859.827	1.071.459.395	(9,00)
Jumlah	1.167.859.827	1.071.459.395	(9,00)

D.3 Beban Persediaan

*Beban
 Persediaan Rp
 28.981.260*

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 28.981.260 dan Rp 16.312.000. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan	28.981.260	16.312.000	(77,66)
Jumlah	28.981.260	16.312.000	(77,66)

*Beban Barang
 dan Jasa Rp
 261.770.101*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 261.770.101 dan Rp 227.102.100. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau

jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Barang dan Jasa	261.770.101	227.102.100	(15,26)
Jumlah	261.770.101	227.102.100	(15,26)

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp 106.545.430

Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 106.545.430.- dan Rp 43.478.779. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan	106.545.430	43.478.779	(145,05)
Jumlah	106.545.430	43.478.779	(145,05)

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp
60.451.000*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 60.451.000 dan Rp 36.493.752. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas	60.451.000	36.493.752	(65,64)
Jumlah	60.451.000	36.493.752	(65,64)

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi Rp
99.879.849*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 99.879.849 dan Rp 96.754.849.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	99.879.849	96.754.849	
Jumlah Penyusutan	99.879.849	96.754.849	
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	0	0	
Jumlah Amortisasi	0	0	
Jumlah Penyusutan dan Amortisasi	99.879.849	96.754.849	

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp 1.695.000

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan Alat Angkut Darat	0	-	-
Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan kegiatan Non Operasional Lainnya	6.000	10.000	-
Defisit Selisih Kurs	0	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	6.000	10.000	-40,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp 5.569.904.945

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 5.569.904.945 dan Rp 695.851.861.

Defisit LO

Rp

(1.723.453.467)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp(1.723.453.467) dan Rp(1.490.583.875). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Persediaan Rp

0

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian / Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Koreksi Nilai

Aset Tetap Rp0

E.7 Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Nilai Koreksi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Koreksi
Aset Tetap Lainnya	
Monografi	-
Jumlah	-

Ekuitas Akhir

Rp17.979.420.098

E.10 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 17.979.420.098 dan Rp 1.467.360.186.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah periode pelaporan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1 Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Untuk Periode Pelaporan ini Pengadilan Agama Lolak tidak ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

F.2.2 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada periode pelaporan ini.

F.2.3 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Lolak adalah :

- Nama Rekening : BPG 158 PENGADILAN AGAMA LOLAK 01, Nomor Rekening : 653244018881000 pada Bank Rakyat Indonesia Cab. Kotamobagu. Saldo 30 Juni 2021 sebesar Rp.0.-

Persetujuan Kembali Pembukaan Rekening dari KPPN Manado Nomor : S-1407/WPB.12/KP.06/2021 Tanggal 27 Mei 2021.

F.2.4 Revisi DIPA

DIPA Pengadilan Agama Lolak Nomor DIPA-005.01.2.401888/2021 Tanggal 14 November 2020 Sampai pada periode pelaporan ini belum melakukan revisi DIPA.

F.2.5 Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat Ralat baik itu SPM, SSBP maupun SSPB pada periode Pelaporan ini.

F.2.6 Catatan Penting Lainnya

Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Lolak ditunjuk oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Pengguna Anggaran melalui Surat Keputusan Nomor : 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 Tanggal 2 Desember 2020. Selanjutnya Sekretaris Pengadilan Agama Lolak menindaklanjuti dengan Keputusan Nomor : W18-A7/01/KP.04.6/I/2021 Tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukkan/Pengangkatan Pejabat Sekretariat Pengelola Pengguna Anggaran.

Susunan Pejabat Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Lolak :

Kuasa Pengguna Anggaran : Rachmat Enoch, S.Ag
Pejabat Pembuat Komitmen : Rachmat Enoch, S.Ag
Pejabat Penandatanganan / Penguji SPM : Zweetly Daryono
Soeratiojo, S.Kom
Bendahara : Sri Rahayu Damiti, S.HI., MH